

Dari Arsip Kertas Menuju Memori Digital: Rekonseptualisasi Arsip Digital melalui Ekoteologi Melayu-Islam untuk Memperkuat Ketahanan Budaya di Era Multipolar

Nirwati^{1*}, Supiana²

¹ Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: nirwati@anri.go.id

Abstrak: Transisi dari arsip berbasis kertas menuju memori digital merupakan salah satu transformasi peradaban paling mendasar pada abad ke-21 yang mengubah cara masyarakat melestarikan pengetahuan, membangun identitas kolektif, dan menjaga keberlanjutan budaya antargenerasi. Meskipun transformasi arsip digital telah mempercepat modernisasi administrasi serta memperluas akses publik terhadap informasi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada inovasi teknologi, pengelolaan arsip elektronik, dan tata kelola digital, sementara perhatian terhadap landasan etika dan budaya yang diperlukan untuk menjaga memori digital sebagai aset peradaban masih relatif terbatas. Kesenjangan konseptual ini menjadi semakin penting dalam konteks dunia Melayu yang mewarisi nilai-nilai *amanah*, *khalifah*, *mizan*, dan *maslahah* sebagai tradisi etis dalam menjaga pengetahuan, alam, dan tanggung jawab antargenerasi. Penelitian ini bertujuan merekonseptualisasi arsip digital sebagai infrastruktur memori peradaban melalui pengembangan kerangka ekoteologi yang mengintegrasikan nilai-nilai Melayu-Islam dengan tata kelola arsip digital untuk memperkuat ketahanan budaya pada era multipolar. Penelitian menggunakan pendekatan *qualitative archival research* melalui analisis dokumen terhadap berbagai sumber primer yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), meliputi peraturan perundang-undangan kearsipan, kebijakan strategis, dokumen implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), pedoman preservasi arsip, serta dokumen pelestarian warisan dokumenter nasional. Analisis diperkuat melalui telaah literatur mutakhir mengenai arsip digital, preservasi digital, keberlanjutan, ketahanan budaya, ekoteologi, dan kajian memori (*memory studies*). Data dianalisis menggunakan *thematic content analysis* dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi arsip digital di Indonesia tidak hanya merupakan modernisasi teknologi, tetapi juga mencerminkan proses peradaban dalam menjaga memori kolektif dan keberlanjutan budaya. Implementasi SRIKANDI, bersama dengan pelestarian arsip tekstual, foto, kartografi, audiovisual, dan arsip digital asli (*born-digital archives*), menunjukkan bahwa tata kelola arsip digital mampu meningkatkan akuntabilitas administrasi, mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih ramah lingkungan, menjamin keberlanjutan pelestarian pengetahuan, serta melindungi warisan dokumenter nasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF) sebagai kerangka normatif-konseptual yang mengintegrasikan etika ekoteologi Melayu-Islam, *knowledge stewardship*, tata kelola arsip digital, keberlanjutan, dan ketahanan budaya. EDARF merekonseptualisasi arsip digital tidak hanya sebagai sistem informasi, tetapi sebagai infrastruktur memori peradaban yang menjaga nilai-nilai etis, identitas kolektif, dan kesinambungan budaya lintas generasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan memori digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi, tetapi juga oleh pengelolaan yang berlandaskan nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam, sehingga menawarkan perspektif teoretis baru bagi pengembangan tata kelola arsip digital dalam masyarakat multipolar kontemporer.

Kata Kunci: Memori Digital; Arsip Digital; Ekoteologi Melayu-Islam; Ketahanan Budaya; Memori Peradaban; *Knowledge Stewardship*; EDARF.

Pendahuluan

Abad ke-21 ditandai oleh transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam cara masyarakat menciptakan, melestarikan, mengakses, dan mentransmisikan pengetahuan. Perkembangan pesat teknologi digital seperti komputasi awan (*cloud computing*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), analisis *big data*, serta komunikasi berbasis jaringan, telah mengubah secara fundamental proses produksi dan sirkulasi informasi di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Transformasi ini mendorong lahirnya sebuah peradaban digital (*digital civilization*), yaitu suatu kondisi ketika aktivitas administrasi publik, produksi pengetahuan, ekspresi budaya, dan memori kolektif semakin banyak diciptakan, dikelola, dan dipelihara dalam lingkungan digital. Dalam konteks tersebut, tantangan yang dihadapi pemerintah, lembaga budaya, dan institusi kearsipan tidak lagi sekadar bagaimana mendigitalisasi informasi, melainkan bagaimana memastikan bahwa memori digital (*digital memory*) dapat dipelihara, dijaga autentisitasnya, dan diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi mendatang.

Urgensi persoalan tersebut semakin meningkat seiring dengan munculnya tatanan dunia multipolar yang ditandai oleh perubahan geopolitik yang dinamis, kompetisi teknologi global, meningkatnya ancaman siber, bencana akibat perubahan iklim, serta pertumbuhan eksponensial arsip digital asli (*born-digital archives*). Perkembangan tersebut telah mengubah karakter bukti dokumenter secara mendasar. Berbeda dengan arsip berbasis kertas yang dapat bertahan selama ratusan tahun apabila dipelihara dengan baik, arsip digital bergantung pada keberlangsungan infrastruktur teknologi, kompatibilitas perangkat lunak, integritas metadata, serta strategi preservasi digital yang berkesinambungan agar tetap autentik dan dapat diakses dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pelestarian memori digital kini telah berkembang menjadi isu strategis global yang tidak lagi terbatas pada aspek teknis pengelolaan arsip elektronik, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan budaya, akuntabilitas kelembagaan, kedaulatan pengetahuan, dan ketahanan peradaban.

Dalam konteks tersebut, warisan dokumenter (*documentary heritage*) memperoleh perhatian yang semakin besar di tingkat internasional. UNESCO mendefinisikan warisan dokumenter sebagai memori terdokumentasi umat manusia yang merepresentasikan keragaman budaya, sistem pengetahuan, pengalaman sejarah, dan pencapaian intelektual berbagai peradaban. Melalui Programme Memory of the World (MoW) yang dibentuk pada tahun 1992, UNESCO berupaya mencegah hilangnya warisan dokumenter akibat bencana alam, konflik bersenjata, kelalaian, keterbatasan sistem preservasi, maupun keusangan teknologi. Program tersebut berlandaskan pada prinsip bahwa warisan dokumenter merupakan milik bersama umat manusia yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dijamin aksesnya bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. UNESCO juga menegaskan bahwa warisan dokumenter bukan sekadar sumber sejarah, melainkan salah satu fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan karena memperkuat dimensi budaya yang mendukung pencapaian seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs).¹

Perspektif tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dalam memandang arsip. Jika sebelumnya arsip lebih dipahami sebagai kumpulan dokumen administratif dan alat bukti hukum untuk mendukung akuntabilitas pemerintahan, maka perkembangan ilmu kearsipan kontemporer semakin menempatkan arsip sebagai infrastruktur memori (*infrastructures of memory*) yang memungkinkan masyarakat membangun identitas kolektif, melestarikan pengetahuan budaya, serta menjaga kesinambungan sejarah. Dengan demikian, fungsi arsip tidak lagi terbatas sebagai instrumen administrasi, tetapi juga sebagai media yang menyimpan pengalaman intelektual, budaya, ilmiah, keagamaan, dan sosial suatu bangsa. Arsip memungkinkan suatu masyarakat memahami masa lalunya, memaknai kondisi masa kini, sekaligus membangun visi masa depan. Dalam era transformasi digital, arsip menjadi institusi strategis yang tidak hanya menjaga informasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan memori peradaban.

Pengakuan internasional terhadap pentingnya warisan dokumenter juga mencerminkan pemahaman yang semakin luas bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, maupun perlindungan lingkungan semata. UNESCO menempatkan kebudayaan dan warisan dokumenter sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan karena memori budaya menyediakan pengetahuan, identitas, dan kesinambungan sejarah yang menjadi fondasi masyarakat yang tangguh (*resilient societies*). Oleh sebab itu, pelestarian arsip berkontribusi secara langsung terhadap penguatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, tata kelola pemerintahan yang baik, dialog antarbudaya, pemulihan pascabencana, serta ketahanan sosial. Dengan demikian, melestarikan arsip bukan hanya berarti menjaga rekaman masa lalu, melainkan juga merupakan investasi strategis bagi kemampuan generasi mendatang untuk memperoleh pengetahuan yang autentik, mempertahankan identitas budaya, dan merespons berbagai tantangan global secara adaptif.

Meskipun demikian, percepatan transformasi dari arsip berbasis kertas menuju memori digital juga menghadirkan tantangan yang melampaui aspek modernisasi teknologi. Transformasi digital memang mampu memperluas akses informasi serta meningkatkan efisiensi administrasi, namun pada saat yang sama memunculkan persoalan mendasar mengenai autentisitas arsip, keberlanjutan preservasi jangka panjang, pengelolaan yang beretika (*ethical stewardship*), representasi budaya, serta tanggung jawab antargenerasi. Ketika masyarakat semakin bergantung pada infrastruktur digital, pelestarian memori tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis sistem informasi. Sebaliknya, pelestarian memori membutuhkan suatu kerangka normatif yang mampu mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai etika, tradisi budaya, tanggung jawab ekologis, serta pengelolaan pengetahuan yang berkelanjutan (*sustainable knowledge stewardship*). Dalam konteks inilah penelitian ini memposisikan arsip digital bukan hanya sebagai sistem informasi, melainkan sebagai infrastruktur memori peradaban yang keberlanjutannya bergantung pada nilai-nilai etis yang mampu memperkuat ketahanan budaya di tengah dinamika masyarakat digital dan era multipolar.

Sepanjang sejarah, suatu peradaban tidak hanya dikenang melalui monumen, artefak, ataupun tradisi lisan, tetapi juga melalui jejak-jejak dokumenter yang merekam pengalaman manusia lintas generasi. Setiap masyarakat mendokumentasikan keputusan politik, ekspresi budaya, penemuan ilmiah, tradisi keagamaan, hingga aktivitas kehidupan sehari-hari dalam berbagai bentuk rekaman yang pada akhirnya menjadi arsip. Oleh karena itu, arsip tidak dapat lagi dipahami sekadar sebagai tempat penyimpanan dokumen administratif, melainkan sebagai fondasi dokumenter yang memungkinkan suatu peradaban mengingat dirinya sendiri. Dalam perspektif ini, arsip

mentransformasikan informasi yang terekam menjadi memori sosial yang berkelanjutan sehingga masyarakat mampu membangun kembali identitas, menjaga kesinambungan budaya, serta mempertahankan legitimasi sejarah di tengah perubahan politik, teknologi, maupun lingkungan. Pergeseran tersebut menandai perubahan mendasar dalam paradigma ilmu kearsipan, yaitu dari memandang arsip sebagai penyimpan dokumen menuju pemahaman bahwa arsip merupakan infrastruktur memori peradaban.

Landasan teoritis dari perubahan tersebut dapat ditelusuri melalui perkembangan teori memori kolektif (*collective memory*). Halbwachs menjelaskan bahwa memori pada hakikatnya merupakan konstruksi sosial karena manusia mengingat melalui kerangka yang dibangun oleh keluarga, komunitas, institusi, dan tradisi budaya, bukan semata-mata melalui ingatan individual (Halbwachs, 1992). Dengan demikian, memori kolektif terus dibentuk dan direkonstruksi melalui pengalaman bersama serta praktik-praktik sosial yang memungkinkan masyarakat memahami masa lalunya dan mempertahankan identitas bersama. Dalam konteks tersebut, rekaman dokumenter memperoleh makna bukan hanya karena menyimpan fakta, tetapi karena menyediakan landasan dokumenter yang memungkinkan memori kolektif diverifikasi, diwariskan, dan dimaknai kembali. Oleh sebab itu, arsip menjadi institusi yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan kesadaran sejarah melalui pelestarian bukti dokumenter yang memungkinkan masyarakat mengingat, menafsirkan ulang, dan menegosiasikan masa lalunya.

Hubungan antara arsip dan memori semakin dipertegas oleh Nora melalui konsep *lieux de mémoire* atau situs-situs memori. Menurut Nora (1989), masyarakat modern semakin bergantung pada berbagai institusi memori karena memori hidup (*living memory*) secara perlahan memudar seiring perubahan sosial yang semakin cepat. Arsip, perpustakaan, museum, monumen, dan berbagai institusi warisan dokumenter kemudian berfungsi sebagai ruang tempat memori kolektif diwujudkan, dilindungi, dan terus direkonstruksi. Institusi-institusi tersebut tidak sekadar menyimpan bukti sejarah, tetapi juga menjadi mediator yang menghubungkan sejarah, identitas, dan kesinambungan budaya. Dengan demikian, arsip berperan aktif dalam membentuk memori sosial melalui cara arsip dipilih, dideskripsikan, dipreservasi, dan disediakan bagi masyarakat lintas generasi.

Perkembangan ilmu kearsipan kontemporer semakin memperluas perspektif tersebut dengan menegaskan bahwa arsip bukanlah institusi yang netral ataupun sekadar sistem informasi teknis. Schwartz dan Cook (2002) menjelaskan bahwa arsip berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan memori sosial karena setiap proses penilaian, seleksi, deskripsi, maupun preservasi arsip akan menentukan suara siapa yang diabadikan dan sejarah mana yang memperoleh legitimasi. Sejalan dengan itu, Cook (2013) menunjukkan bahwa paradigma kearsipan telah bergeser dari orientasi pada pembuktian administratif menuju pembentukan identitas, memori komunitas, dan akuntabilitas sosial. Ketelaar (2001) juga menegaskan bahwa arsip senantiasa menghasilkan makna-makna baru ketika setiap generasi menafsirkan kembali warisan dokumenter sesuai dengan konteks budaya dan sejarahnya masing-masing. Pandangan-pandangan tersebut menempatkan arsip sebagai infrastruktur dinamis yang memungkinkan masyarakat membangun dan menegosiasikan memori kolektifnya.

Transformasi digital semakin memperluas peran tersebut dengan menjadikan arsip sebagai infrastruktur memori digital. Pertumbuhan eksponensial arsip digital asli (*born-digital archives*), media sosial, data ilmiah, rekaman audiovisual, layanan pemerintahan digital, dan informasi berbasis komputasi awan telah mengubah lanskap kearsipan secara fundamental. Arsip saat ini tidak lagi hanya bertanggung jawab memelihara koleksi fisik, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekosistem pengetahuan digital yang sangat kompleks. Oleh karena itu, preservasi arsip kini mencakup persoalan autentisitas, integritas metadata, interoperabilitas, keamanan siber, akses jangka panjang, serta keberlanjutan teknologi. Dalam konteks ini, arsip digital tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan informasi elektronik, tetapi berkembang menjadi infrastruktur terpercaya yang menjaga kesinambungan memori peradaban di tengah perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Memahami arsip sebagai infrastruktur memori peradaban juga berarti mengakui bahwa praktik kearsipan mengandung dimensi etis yang melampaui aspek teknis preservasi. Keputusan mengenai penilaian arsip, pelestarian, akses, kurasi digital, dan representasi dokumenter pada akhirnya menentukan memori siapa yang akan diwariskan, sejarah mana yang akan tetap terlihat, dan nilai-nilai budaya apa yang akan diteruskan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, keberlanjutan memori digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada prinsip-prinsip etis yang membimbing pengelolaan pengetahuan secara bertanggung jawab. Pemahaman inilah yang menjadi landasan konseptual penelitian ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menempatkan arsip digital sebagai infrastruktur teknologi, penelitian ini merekonseptualisasi arsip digital sebagai infrastruktur memori peradaban yang keberlanjutannya ditentukan oleh integrasi antara nilai-nilai etis, tradisi budaya, dan tata kelola digital. Pergeseran konseptual tersebut menjadi dasar untuk membahas tantangan etis transformasi digital serta menjelaskan relevansi ekoteologi Melayu-Islam sebagai kerangka normatif dalam memperkuat ketahanan budaya di era multipolar.

Memahami arsip sebagai infrastruktur memori peradaban secara mendasar mengubah cara kita memandang transformasi digital. Keberlanjutan memori digital tidak dapat dijamin hanya melalui inovasi teknologi, kepatuhan terhadap regulasi, maupun penerapan sistem informasi. Karena arsip menyimpan identitas, makna budaya, legitimasi sejarah, serta pengetahuan antargenerasi, maka tata kelola arsip digital selalu melibatkan pilihan-pilihan etis mengenai tanggung jawab, keadilan, inklusivitas, dan pengelolaan pengetahuan. Setiap keputusan mengenai arsip apa yang dipelihara, bagaimana warisan dokumenter direpresentasikan, dan memori siapa yang dilindungi

untuk jangka panjang pada hakikatnya mencerminkan sistem nilai tertentu, bukan sekadar pertimbangan teknis. Oleh karena itu, transformasi digital memerlukan suatu kerangka normatif yang mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan tanggung jawab etis, kesinambungan budaya, dan keberlanjutan ekologis. Kebutuhan inilah yang menjadi landasan konseptual untuk mengeksplorasi ekoteologi Melayu-Islam sebagai kerangka etis dalam pengelolaan memori digital dan penguatan ketahanan peradaban.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara masyarakat menciptakan, melestarikan, mengakses, dan mentransmisikan warisan dokumenter. Oleh karena itu, transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai perpindahan dari arsip berbasis kertas menuju sistem informasi elektronik, tetapi juga sebagai proses yang membentuk cara generasi mendatang mengingat masa lalu. Setiap keputusan mengenai standar metadata, strategi preservasi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan, infrastruktur komputasi awan, maupun tata kelola arsip akan memengaruhi dokumen apa yang tetap dapat diakses, suara siapa yang terus terwakili, dan memori budaya mana yang perlahan menghilang. Dengan demikian, transformasi digital bukan sekadar proses teknologi, melainkan juga merupakan proses etis dalam membentuk memori kolektif.

Berbeda dengan arsip kertas yang keberadaannya secara fisik relatif menjamin kesinambungan penyimpanan, memori digital bergantung pada ekosistem teknologi yang terus berkembang. Keusangan perangkat keras, perubahan perangkat lunak, ancaman keamanan siber, ketergantungan pada platform digital, kualitas metadata, serta preservasi arsip digital asli (*born-digital archives*) menjadi tantangan utama dalam menjaga autentisitas dan aksesibilitas arsip dalam jangka panjang. Menyadari tantangan tersebut, UNESCO menegaskan bahwa pelestarian warisan dokumenter di era digital memerlukan lebih dari sekadar inovasi teknologi; pelestarian tersebut membutuhkan tata kelola yang berkelanjutan agar memori dokumenter tetap dapat diakses oleh generasi mendatang (UNESCO, 2025). Dengan demikian, preservasi digital merupakan bentuk tanggung jawab antargenerasi, bukan hanya fungsi pengelolaan informasi.

Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya keterbatasan konseptual dalam tata kelola arsip digital saat ini. Berbagai model yang ada telah berhasil meningkatkan efisiensi administrasi, interoperabilitas, dan akuntabilitas hukum, namun belum banyak memberikan perhatian terhadap prinsip-prinsip etis yang seharusnya menjadi landasan pengelolaan memori digital dalam jangka panjang. Persoalan mengenai tanggung jawab budaya, keberlanjutan ekologis, akuntabilitas moral, dan keadilan antargenerasi masih relatif terpinggirkan dalam transformasi arsip digital. Jika arsip dipahami sebagai infrastruktur memori peradaban, maka modernisasi teknologi saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan memori kolektif.

Atas dasar itu, penelitian ini berpendapat bahwa transformasi digital memerlukan suatu kerangka normatif yang mampu mengintegrasikan inovasi teknologi dengan pengelolaan pengetahuan yang etis, kesinambungan budaya, dan tanggung jawab ekologis. Dalam konteks Indonesia, implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) menunjukkan kemajuan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital dan administrasi tanpa kertas. Namun, kontribusinya terhadap ketahanan budaya dalam jangka panjang sangat bergantung pada nilai-nilai yang mengarahkan bagaimana memori digital dipelihara, direpresentasikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Argumentasi inilah yang menjadi jembatan konseptual menuju pembahasan ekoteologi Melayu-Islam sebagai kerangka normatif sekaligus menjadi dasar pengembangan Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF) yang diusulkan dalam penelitian ini.

Berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan arsip digital, preservasi digital, pemerintahan berbasis elektronik, keberlanjutan, warisan budaya, serta ekoteologi Islam. Dalam bidang ilmu kearsipan, perhatian utama umumnya diarahkan pada inovasi teknologi, interoperabilitas, strategi preservasi digital, pengelolaan arsip elektronik, serta penguatan akuntabilitas kelembagaan. Di sisi lain, kajian ekoteologi lebih banyak membahas etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan, serta hubungan antara agama dan tanggung jawab ekologis. Sementara itu, studi mengenai memori kolektif telah menunjukkan pentingnya warisan dokumenter dalam menjaga identitas bersama dan kesinambungan sejarah. Meskipun ketiga rumpun kajian tersebut berkembang pesat, masing-masing masih bergerak dalam batas-batas disiplin yang relatif terpisah sehingga belum menghasilkan integrasi konseptual yang memadai antara tata kelola arsip digital, memori peradaban, ketahanan budaya, dan etika pengelolaan pengetahuan.

Secara lebih khusus, literatur yang ada belum menjelaskan bagaimana ekosistem arsip digital dapat berfungsi secara bersamaan sebagai infrastruktur teknologi sekaligus infrastruktur etis dalam menjaga keberlanjutan memori peradaban. Model tata kelola arsip digital yang berkembang saat ini masih didominasi oleh orientasi pada modernisasi administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, interoperabilitas sistem, serta efisiensi layanan digital, sedangkan dimensi etis mengenai keberlanjutan memori digital masih memperoleh perhatian yang terbatas. Di sisi lain, kajian ekoteologi juga belum banyak menempatkan arsip digital dan warisan dokumenter sebagai objek tanggung jawab ekologis dan moral. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan konseptual mengenai bagaimana nilai-nilai budaya dan keagamaan lokal dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola arsip digital untuk memperkuat ketahanan budaya sekaligus menjamin keberlanjutan memori kolektif. Kesenjangan ini menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia yang tengah mengalami transformasi digital dengan latar belakang budaya Melayu-Islam yang kuat.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF) sebagai kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan tata kelola arsip digital, memori peradaban, ketahanan budaya, dan nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam ke dalam satu model pengelolaan memori digital yang berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menempatkan arsip digital sebagai sistem teknologi atau infrastruktur administrasi, EDARF merekonstruksikan arsip sebagai infrastruktur etis yang memikul amanah pelestarian warisan dokumenter lintas generasi. Dalam kerangka ini, nilai-nilai amanah, khalifah, mizan, dan masalah menjadi prinsip normatif yang membimbing tata kelola arsip digital agar tidak hanya menghasilkan efisiensi kelembagaan, tetapi juga menjamin kesinambungan budaya, tanggung jawab ekologis, dan keadilan antargenerasi.

Atas dasar tersebut, penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, memperluas perspektif ilmu kearsipan dengan memosisikan arsip digital sebagai infrastruktur memori peradaban, bukan sekadar media penyimpanan informasi digital. Kedua, memperkaya kajian ekoteologi dengan menunjukkan relevansi nilai-nilai etis Melayu-Islam dalam tata kelola arsip digital dan pelestarian warisan dokumenter secara berkelanjutan. Ketiga, memperkenalkan EDARF sebagai kerangka konseptual interdisipliner yang menghubungkan ilmu kearsipan, studi memori, keberlanjutan, dan etika Islam sehingga menawarkan perspektif baru mengenai peran arsip dalam memperkuat ketahanan budaya pada era digital.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi arsip digital di Indonesia, khususnya melalui implementasi SRIKANDI serta pelestarian warisan dokumenter nasional, merefleksikan nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam dan berkontribusi terhadap penguatan ketahanan budaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF) sebagai kerangka konseptual untuk memahami tata kelola arsip digital sebagai infrastruktur etis yang menjaga memori peradaban sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di era digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *qualitative archival research* (penelitian kualitatif berbasis arsip) untuk mengkaji transformasi konseptual tata kelola arsip digital melalui perspektif ekoteologi Melayu-Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berorientasi pada pengujian hubungan kausal antarvariabel, melainkan bertujuan memahami, menginterpretasikan, dan merekonstruksi makna yang terkandung dalam berbagai dokumen kelembagaan, kebijakan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan transformasi arsip digital. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan tata kelola arsip digital di Indonesia sekaligus mengaitkannya dengan dimensi etika, keberlanjutan, dan ketahanan budaya dalam konteks era multipolar.

Sumber data utama penelitian berasal dari berbagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, kebijakan strategis nasional, dokumen implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), pedoman preservasi arsip digital, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelestarian warisan dokumenter nasional. Seluruh dokumen dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian, yaitu transformasi tata kelola arsip digital, preservasi arsip, penguatan memori institusional, dan pelestarian memori kolektif bangsa.

Untuk memperkuat landasan konseptual, penelitian ini juga melakukan telaah terhadap berbagai literatur ilmiah mutakhir yang membahas arsip digital, preservasi digital, keberlanjutan (*sustainability*), ketahanan budaya (*cultural resilience*), ekoteologi, serta kajian memori (*memory studies*). Kajian literatur tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai sarana untuk menempatkan transformasi kearsipan digital di Indonesia dalam diskursus akademik global yang berkembang mengenai tata kelola arsip digital yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan pembangunan memori kolektif di era digital.

Analisis data dilakukan menggunakan *thematic content analysis* melalui proses identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi terhadap tema-tema yang muncul secara berulang dalam dokumen kebijakan maupun literatur ilmiah. Proses analisis difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan tata kelola arsip digital, preservasi arsip, memori institusional, pelestarian warisan dokumenter, keberlanjutan, serta ketahanan budaya. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan perspektif ekoteologi Melayu-Islam untuk mengidentifikasi nilai-nilai etik, seperti *amanah*, *khalifah*, *mizan*, *masalah*, *rahmah*, dan *adab*, yang berpotensi menjadi landasan normatif dalam pengembangan tata kelola arsip digital yang berkelanjutan.

Tahap akhir penelitian dilakukan melalui sintesis konseptual dengan mengintegrasikan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis dokumen kelembagaan dan literatur ilmiah ke dalam suatu kerangka konseptual yang utuh. Sintesis ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis empiris, melainkan untuk merekonstruksi pemahaman mengenai arsip digital sebagai sistem memori budaya (*cultural memory system*) yang tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur informasi, tetapi juga sebagai instrumen pelestarian identitas, penguatan ketahanan budaya, dan keberlanjutan peradaban. Melalui proses sintesis tersebut, penelitian ini menawarkan suatu perspektif

konseptual yang menghubungkan tata kelola arsip digital dengan nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam sebagai fondasi etis dalam memperkuat ketahanan budaya di era multipolar.

Hasil dan Pembahasan

1. Transformasi Kearsipan Digital Nasional

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa transformasi kearsipan di Indonesia telah berkembang dari pengelolaan arsip berbasis kertas menuju ekosistem arsip digital yang terintegrasi secara nasional. Transformasi tersebut menjadi relevan dalam konteks tema Malay-Islamic Eco-Theology as Cultural Resilience karena pengelolaan arsip digital diposisikan tidak hanya sebagai inovasi administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan memori budaya dan tanggung jawab antargenerasi. Perubahan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menegaskan bahwa arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa serta berfungsi sebagai memori kolektif, alat bukti yang sah, dan sumber akuntabilitas nasional.

Transformasi tersebut diwujudkan melalui implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai platform nasional pengelolaan arsip dinamis berbasis elektronik. Berdasarkan Dashboard Monitoring SRIKANDI Arsip Nasional Republik Indonesia per 15 Juli 2026, sistem ini telah digunakan oleh 154 instansi pemerintah pusat dan 533 pemerintah daerah, sehingga mencakup total 687 organisasi. Pada periode yang sama tercatat 1.717.347 pengguna aktif, atau sekitar 73% dari seluruh pengguna terdaftar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI telah berkembang dari tahap adopsi awal menjadi infrastruktur digital yang digunakan secara luas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Aktivitas yang terekam dalam sistem menunjukkan tingginya intensitas pengelolaan arsip digital pada berbagai tahapan siklus hidup arsip. Selama periode Januari–Juli 2026, sistem mencatat lebih dari 90 juta naskah masuk, sekitar 80 juta naskah keluar, serta lebih dari 82 juta disposisi elektronik. Selain itu, jutaan berkas aktif dan arsip yang telah memasuki tahap retensi juga terdokumentasi dalam sistem. Temuan ini menunjukkan bahwa SRIKANDI tidak hanya mendukung digitalisasi korespondensi, tetapi juga memfasilitasi pengelolaan arsip secara menyeluruh mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, temuan tersebut mengindikasikan bahwa transformasi arsip digital di Indonesia telah bergerak melampaui digitalisasi administratif menuju pembentukan infrastruktur memori digital nasional. Perluasan implementasi SRIKANDI menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjaga keberlanjutan informasi, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan bahwa arsip digital tetap berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan memori institusional yang berkesinambungan. Temuan ini menjadi dasar bagi pembahasan pada subbagian berikutnya mengenai peran arsip digital dalam membangun memori institusional dan ketahanan budaya.

Tabel 1. Cakupan Implementasi Nasional SRIKANDI per Juli 2026

Indikator	Nilai
Instansi Pemerintah Pusat	154
Pemerintah Daerah	533
Total Organisasi	687
Pengguna Aktif	1.717.347
Persentase Pengguna Aktif	73%
Pengguna Tidak Aktif	27%

Sumber: Dashboard Monitoring SRIKANDI Arsip Nasional Republik Indonesia (diakses 15 Juli 2026).

2. Arsip Digital sebagai Memori Institusional

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI tidak hanya mengubah mekanisme pengelolaan arsip dinamis, tetapi juga memperkuat fungsi arsip sebagai memori institusional (*institutional memory*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengelolaan arsip secara elektronik, setiap proses administrasi—mulai dari penciptaan naskah dinas, distribusi, disposisi, hingga penyimpanan arsip—terekam secara sistematis dalam satu platform yang terintegrasi. Kondisi ini memungkinkan informasi kelembagaan terdokumentasi secara berkelanjutan sehingga dapat ditelusuri kembali sebagai dasar pengambilan keputusan, akuntabilitas organisasi, serta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

Temuan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menempatkan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa sekaligus memori kolektif yang harus dijaga keberlanjutannya. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan, fungsi tersebut tercermin melalui kemampuan sistem dalam mendokumentasikan seluruh proses administrasi secara digital sehingga pengetahuan kelembagaan

tidak lagi bergantung pada individu, melainkan tersimpan sebagai aset organisasi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Besarnya volume arsip yang dikelola melalui SRIKANDI memperlihatkan terbentuknya repositori informasi pemerintahan dalam skala nasional. Dashboard Monitoring SRIKANDI menunjukkan bahwa hingga Juli 2026 sistem telah mencatat lebih dari 90 juta naskah masuk, sekitar 80 juta naskah keluar, lebih dari 82 juta disposisi elektronik, serta jutaan berkas aktif dan arsip yang memasuki masa retensi. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah secara simultan membentuk akumulasi memori institusional yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, arsip digital tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan organisasi (*organizational knowledge*) yang mendukung kontinuitas tata kelola pemerintahan.

Tabel 2. Indikator Pembentukan Memori Institusional melalui SRIKANDI

Indikator	Temuan
Penciptaan naskah dinas elektronik	Seluruh proses terdokumentasi secara digital
Integrasi surat masuk, surat keluar, dan disposisi	Membentuk rekam jejak administrasi organisasi
Penyimpanan arsip secara elektronik	Menjamin keberlanjutan informasi kelembagaan
Berkas aktif dan arsip retensi	Mendukung pengelolaan siklus hidup arsip
Volume arsip digital nasional	Menunjukkan akumulasi memori institusional secara berkelanjutan

Sumber: Diolah dari Dashboard Monitoring SRIKANDI ANRI dan dokumen implementasi SRIKANDI (2026).

Hasil analisis tematik juga menunjukkan bahwa fungsi arsip digital telah mengalami perluasan makna, dari sekadar media penyimpanan informasi menjadi infrastruktur yang menjaga keberlanjutan pengetahuan organisasi (*knowledge continuity*). Melalui dokumentasi yang sistematis, setiap keputusan, kebijakan, dan aktivitas administrasi dapat ditelusuri kembali sehingga mendukung proses pembelajaran organisasi (*organizational learning*), transfer pengetahuan antargenerasi, serta penguatan memori kelembagaan. Temuan ini menjadi landasan penting untuk memahami bahwa transformasi arsip digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi, tetapi juga membangun fondasi bagi pelestarian memori kolektif dan ketahanan budaya, yang akan dibahas lebih lanjut pada subbagian berikutnya mengenai preservasi arsip digital dan warisan dokumenter.

3. Preservasi Digital dan Warisan Dokumenter

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa transformasi arsip digital tidak berhenti pada proses digitalisasi administrasi, tetapi berlanjut pada upaya menjaga keberlanjutan informasi melalui kegiatan preservasi arsip. Dalam sistem kearsipan nasional, preservasi merupakan tahapan yang memastikan arsip tetap autentik, utuh, dapat diakses, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang meskipun media, teknologi, maupun lingkungan penyimpanannya terus mengalami perubahan. Dengan demikian, preservasi digital menjadi komponen penting dalam menjaga kesinambungan memori institusional sekaligus menjamin keberlangsungan warisan dokumenter sebagai bagian dari memori kolektif bangsa.

Komitmen tersebut tercermin dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis, yang mengatur bahwa kegiatan preservasi dilakukan terhadap berbagai jenis arsip statis, meliputi arsip tekstual, kartografi, kearsitekturan, foto, audiovisual, arsip elektronik, serta media rekam lainnya. Pedoman tersebut juga menegaskan bahwa preservasi dilaksanakan melalui berbagai tindakan preventif maupun kuratif, seperti pengendalian lingkungan penyimpanan, reproduksi, restorasi, digitalisasi, dan alih media sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis arsip. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan arsip digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem informasi, tetapi juga oleh kebijakan preservasi yang menjamin kelestarian informasi sepanjang siklus hidup arsip statis.

Analisis terhadap dokumen preservasi ANRI memperlihatkan bahwa pendekatan preservasi tidak hanya berorientasi pada perlindungan fisik media arsip, tetapi juga pada perlindungan nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, digitalisasi dan alih media berfungsi sebagai strategi untuk memperluas akses sekaligus mengurangi risiko kehilangan informasi akibat kerusakan media asli, bencana, maupun degradasi teknologi. Dengan demikian, preservasi digital berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan memori institusional yang telah terbentuk pada tahap pengelolaan arsip dinamis dengan pelestarian warisan dokumenter yang memiliki nilai guna berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.

Tabel 3. Cakupan Preservasi Arsip Statis berdasarkan Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2011

Aspek Preservasi	Ruang Lingkup
Objek preservasi	Arsip tekstual, kartografi, kearsitekturan, foto, audiovisual, arsip elektronik, dan media rekam lainnya
Tujuan	Menjaga keutuhan, keaslian, keterbacaan, dan keberlanjutan akses arsip
Bentuk kegiatan	Preservasi preventif, preservasi kuratif, restorasi, reproduksi, digitalisasi, dan alih media
Hasil yang diharapkan	Terlindungnya informasi dan warisan dokumenter untuk pemanfaatan jangka panjang
Sumber: Diolah dari Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis.	

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa preservasi arsip digital memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menjaga keberadaan dokumen elektronik. Preservasi memungkinkan pengetahuan, pengalaman kelembagaan, dan berbagai bukti sejarah tetap tersedia sebagai sumber pembelajaran lintas generasi. Dalam konteks tersebut, warisan dokumenter tidak hanya dipahami sebagai kumpulan arsip yang memiliki nilai historis, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang merekam perjalanan bangsa. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan arsip digital merupakan prasyarat penting dalam menjaga kesinambungan memori kolektif yang selanjutnya berkontribusi terhadap penguatan ketahanan budaya.

4. Kelestarian Lingkungan dan Pengarsipan Ramah Lingkungan

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa transformasi arsip digital di Indonesia tidak hanya menghasilkan perubahan dalam tata kelola administrasi dan preservasi informasi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*). Pergeseran dari penggunaan arsip berbasis kertas menuju pengelolaan arsip secara elektronik mengurangi ketergantungan pada media konvensional yang selama ini memerlukan konsumsi kertas, ruang penyimpanan fisik, serta berbagai sumber daya pendukung lainnya. Dengan demikian, implementasi arsip digital memperlihatkan bahwa inovasi kearsipan memiliki implikasi yang melampaui aspek teknologi dan administrasi, yaitu mendukung praktik penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada keberlanjutan.

Analisis terhadap implementasi SRIKANDI menunjukkan bahwa seluruh proses utama pengelolaan arsip dinamis, mulai dari penciptaan naskah dinas, distribusi surat, disposisi, persetujuan dokumen, hingga penyimpanan arsip dilakukan secara elektronik dalam satu platform yang terintegrasi. Perubahan tersebut secara langsung mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen untuk proses administrasi internal yang sebelumnya masih bergantung pada penggunaan media kertas. Selain meningkatkan efisiensi proses kerja, digitalisasi alur administrasi juga mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan arsip aktif, penggunaan bahan habis pakai, serta aktivitas distribusi dokumen secara fisik.

Hasil telaah terhadap kebijakan preservasi ANRI menunjukkan bahwa transformasi menuju arsip digital juga mendukung strategi pelestarian yang lebih berkelanjutan. Melalui digitalisasi, reproduksi digital, dan alih media sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis, pemanfaatan arsip untuk kepentingan pelayanan, penelitian, maupun pendidikan dapat dilakukan tanpa meningkatkan frekuensi penggunaan arsip asli. Pendekatan tersebut tidak hanya memperluas akses terhadap informasi, tetapi juga mengurangi risiko kerusakan fisik arsip yang bernilai permanen akibat penggunaan berulang. Dengan demikian, preservasi digital berfungsi sebagai mekanisme yang secara simultan mendukung perlindungan warisan dokumenter sekaligus efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa konsep *green archiving* dalam konteks transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pengurangan penggunaan kertas, tetapi mencakup pengelolaan sumber daya secara lebih bertanggung jawab sepanjang siklus hidup arsip. Pengelolaan arsip secara elektronik berkontribusi pada berkurangnya kebutuhan ruang penyimpanan fisik, optimalisasi penggunaan sarana penyimpanan, serta pengurangan aktivitas yang berkaitan dengan pencetakan, penggandaan, dan distribusi dokumen konvensional. Dalam perspektif keberlanjutan, perubahan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola arsip digital dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun administrasi publik yang lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan tanpa mengurangi prinsip autentisitas, integritas, dan aksesibilitas arsip.

Tabel 4. Kontribusi Transformasi Arsip Digital terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Aspek Transformasi	Temuan Hasil Analisis	Kontribusi terhadap Keberlanjutan
Penciptaan naskah dinas elektronik	Dokumen dibuat dan diproses secara digital	Mengurangi penggunaan media kertas
Distribusi dan disposisi elektronik	Proses administrasi dilakukan melalui SRIKANDI	Mengurangi kebutuhan pengiriman dokumen fisik

Penyimpanan arsip digital	Arsip dikelola dalam repositori elektronik	Mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan arsip aktif
Digitalisasi dan alih media	Pemanfaatan arsip dilakukan melalui salinan digital	Mengurangi penggunaan arsip asli serta risiko kerusakan fisik
Preservasi digital	Menjamin keberlanjutan akses informasi	Mendukung efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pelestarian jangka panjang

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis, serta dokumen implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

5. Tema-tema Eko-Teologis yang Muncul dalam Tata Kelola Arsip Digital

Hasil *thematic content analysis* terhadap dokumen kebijakan kearsipan nasional, pedoman preservasi arsip statis, dokumen implementasi SRIKANDI, dan literatur ilmiah menunjukkan bahwa transformasi arsip digital di Indonesia tidak hanya memperlihatkan dimensi administratif dan teknologis, tetapi juga memunculkan sejumlah tema normatif yang berkaitan dengan tata kelola pengetahuan, tanggung jawab antargenerasi, keberlanjutan, dan kemanfaatan publik. Meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak secara eksplisit menggunakan terminologi ekoteologi Melayu-Islam, analisis konseptual memperlihatkan adanya korespondensi yang kuat antara prinsip-prinsip tata kelola arsip digital dengan nilai-nilai etis yang hidup dalam tradisi intelektual Melayu-Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan arsip digital dapat dipahami tidak hanya sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan pengetahuan yang memiliki dimensi moral dan keberlanjutan.

Tema pertama yang muncul adalah tanggung jawab dalam menjaga autentisitas, integritas, dan keberlanjutan arsip, sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan mengenai penciptaan, pengelolaan, dan preservasi arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 serta Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberlangsungan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi digital, tetapi juga pada komitmen kelembagaan untuk menjaga arsip agar tetap dapat dipercaya, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sepanjang siklus hidupnya. Dalam perspektif konseptual penelitian ini, karakteristik tersebut memiliki korespondensi dengan nilai amanah, yaitu tanggung jawab untuk menjaga dan menyampaikan pengetahuan secara benar kepada generasi berikutnya.

Tema kedua berkaitan dengan pengelolaan arsip sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya dan memori kolektif. Implementasi arsip digital, digitalisasi, preservasi, dan alih media menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menjaga keberlangsungan informasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada penggunaan media fisik. Temuan ini memperlihatkan bahwa tata kelola arsip digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi organisasi, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dalam kerangka konseptual penelitian, karakteristik tersebut menunjukkan korespondensi dengan prinsip khalifah, yaitu tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya secara bijaksana dan berorientasi pada keberlanjutan.

Analisis selanjutnya menunjukkan munculnya tema keseimbangan antara inovasi digital dan pelestarian warisan dokumenter. Transformasi digital tidak menggantikan fungsi preservasi arsip statis, tetapi justru memperkuat perlindungan terhadap arsip yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan pembuktian melalui digitalisasi, reproduksi, serta preservasi jangka panjang. Dengan demikian, proses digitalisasi dipahami sebagai pelengkap, bukan pengganti, bagi pelestarian arsip autentik. Temuan ini memiliki korespondensi dengan prinsip mizan, yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pelestarian nilai-nilai yang diwariskan.

Tema berikutnya berkaitan dengan orientasi kemanfaatan publik dalam tata kelola arsip digital. Pengembangan SRIKANDI, perluasan akses informasi, peningkatan akuntabilitas administrasi, serta perlindungan warisan dokumenter menunjukkan bahwa arsip digital diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun masyarakat. Dalam perspektif konseptual penelitian, karakteristik tersebut menunjukkan korespondensi dengan nilai maslahah, yaitu pengelolaan pengetahuan yang memberikan kemanfaatan bersama dan mendukung kesejahteraan sosial.

Tabel 5. Temuan Tematik dan Korespondensinya dengan Nilai Ekoteologi Melayu-Islam

Tema hasil analisis	Bukti pada dokumen	Korespondensi konseptual
Menjaga autentisitas, integritas, dan keberlanjutan arsip	UU No. 43 Tahun 2009; Perka ANRI No. 23 Tahun 2011	Amanah
Pengelolaan sumber daya dan keberlanjutan arsip digital	Implementasi SRIKANDI; Preservasi Digital	Khalifah
Keseimbangan digitalisasi dan preservasi arsip statis	Pedoman Preservasi Arsip	Mizan

Akses informasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik	Implementasi SRIKANDI; UU No. 43 Tahun 2009	Masalah
Sumber: Hasil <i>thematic content analysis</i> terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2011 tentang <i>Pedoman Preservasi Arsip Statis</i> , dokumen implementasi SRIKANDI, dan literatur yang dianalisis dalam penelitian ini.		

Secara keseluruhan, hasil analisis tematik memperlihatkan bahwa tata kelola arsip digital di Indonesia memiliki landasan normatif yang melampaui dimensi teknis dan administratif. Korespondensi konseptual antara prinsip-prinsip tata kelola arsip digital dengan nilai-nilai amanah, khalifah, mizan, dan masalah menunjukkan bahwa pengelolaan arsip digital dapat dipahami sebagai praktik pelestarian pengetahuan yang mendukung keberlanjutan memori kolektif dan ketahanan budaya. Temuan inilah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF) sebagai sintesis konseptual penelitian.

6. Temuan Konseptual: Kerangka Kerja Ketahanan Arsip Digital Eko-Teologis (EDARF)

Hasil sintesis konseptual terhadap keseluruhan temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi arsip digital di Indonesia membentuk suatu pola hubungan yang saling terintegrasi antara tata kelola arsip digital, pengelolaan pengetahuan, preservasi warisan dokumenter, keberlanjutan lingkungan, dan dimensi etis dalam pengelolaan memori digital. Sintesis ini diperoleh melalui integrasi hasil analisis terhadap regulasi kearsipan nasional, dokumen implementasi SRIKANDI, pedoman preservasi arsip statis, serta tema-tema yang muncul dari *thematic content analysis*. Berbeda dengan subbagian sebelumnya yang menyajikan temuan berdasarkan aspek-aspek tertentu, pada tahap ini seluruh hasil penelitian dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga menghasilkan suatu konstruksi konseptual yang utuh. Berdasarkan proses sintesis tersebut, penelitian ini menghasilkan Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF) sebagai representasi konseptual dari hubungan antartemuan yang diperoleh selama penelitian.

EDARF menunjukkan bahwa transformasi arsip digital tidak berlangsung sebagai proses yang berdiri sendiri, melainkan berkembang melalui tahapan yang saling memperkuat. Transformasi digital pada tingkat tata kelola administrasi menjadi fondasi bagi terbentuknya memori institusional yang terdokumentasi secara sistematis. Memori institusional tersebut selanjutnya dipertahankan melalui praktik preservasi arsip sehingga informasi yang memiliki nilai berkelanjutan tetap autentik, utuh, dan dapat dimanfaatkan lintas generasi. Pada saat yang sama, digitalisasi dan preservasi arsip mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya serta mendukung praktik pengelolaan arsip yang lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Rangkaian proses tersebut kemudian memperlihatkan adanya korespondensi konseptual dengan nilai-nilai amanah, khalifah, mizan, dan masalah, yang pada penelitian ini dipahami sebagai landasan etis dalam membangun memori digital yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Tabel 6. Sintesis Konseptual Temuan Penelitian menuju Kerangka Kerja Ketahanan Arsip Digital Eko-Teologis (EDARF)

Temuan Penelitian	Sintesis Konseptual
Transformasi arsip digital melalui implementasi SRIKANDI dan tata kelola arsip elektronik	Digital Archival Governance
Arsip digital sebagai memori institusional yang menjamin kontinuitas informasi	Knowledge Stewardship
Preservasi arsip statis dan arsip digital untuk menjaga autentisitas dan akses jangka panjang	Documentary Heritage Preservation
Digitalisasi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan praktik <i>green archiving</i>	Environmental Sustainability
Korespondensi konseptual antara prinsip tata kelola arsip digital dengan nilai <i>amanah, khalifah, mizan, dan masalah</i>	Malay-Islamic Eco-Theological Values
Integrasi seluruh hasil sintesis	Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF)

Sumber: Hasil sintesis konseptual berdasarkan *thematic content analysis* terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pedoman Preservasi Arsip Statis*, dokumen implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), serta literatur ilmiah yang dianalisis dalam penelitian ini.

Sebagaimana dirangkum pada Tabel 6, setiap komponen dalam EDARF merupakan hasil sintesis langsung dari temuan penelitian, bukan konstruksi yang berdiri secara terpisah. *Digital Archival Governance* merepresentasikan transformasi tata kelola arsip berbasis digital yang didukung oleh regulasi dan implementasi nasional. *Knowledge Stewardship* menggambarkan fungsi arsip sebagai mekanisme pengelolaan pengetahuan dan

keberlanjutan memori institusional. *Documentary Heritage Preservation* menegaskan pentingnya preservasi sebagai jaminan keberlangsungan warisan dokumenter, sedangkan Environmental Sustainability menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki implikasi terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya dan praktik pengelolaan arsip yang lebih berkelanjutan. Seluruh komponen tersebut selanjutnya diperkaya oleh *Malay-Islamic Eco-Theological Values* yang menunjukkan adanya korespondensi konseptual antara prinsip-prinsip tata kelola arsip digital dengan nilai-nilai etis yang berkembang dalam tradisi intelektual Melayu-Islam. Dengan demikian, EDARF tidak dipahami sebagai kumpulan komponen yang berdiri sendiri, tetapi sebagai suatu sistem konseptual yang menghubungkan dimensi administratif, kelembagaan, ekologis, dan etis dalam pengelolaan memori digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa transformasi arsip digital di Indonesia berkembang melalui suatu proses yang berkesinambungan, dimulai dari digitalisasi tata kelola administrasi, penguatan fungsi arsip sebagai memori institusional, preservasi warisan dokumenter, penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan, hingga munculnya dimensi etis yang memiliki korespondensi konseptual dengan nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam. Keseluruhan rangkaian temuan tersebut kemudian disintesis ke dalam Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF) sebagai representasi konseptual yang merangkum hubungan antarkomponen dalam membangun memori digital yang berkelanjutan. Dengan berakhirnya bagian hasil penelitian ini, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada interpretasi teoretis terhadap EDARF, keterkaitannya dengan literatur terdahulu, serta implikasinya bagi pengembangan tata kelola arsip digital dan penguatan ketahanan budaya dalam konteks masyarakat multipolar.

Pembahasan

1. Menafsirkan Ulang Arsip Digital di Luar Teknologi Administratif

Transformasi digital yang berlangsung dalam bidang kearsipan menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan arsip tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai proses modernisasi administrasi berbasis teknologi informasi. Temuan penelitian ini mengindikasikan adanya pergeseran konseptual yang lebih mendasar, yaitu perubahan fungsi arsip digital dari sekadar instrumen administrasi menuju infrastruktur yang menopang keberlanjutan memori peradaban (*civilizational memory infrastructure*). Pergeseran ini memiliki implikasi teoritis yang penting karena menempatkan arsip digital bukan hanya sebagai objek *records management*, melainkan sebagai medium yang memungkinkan pengetahuan, identitas kolektif, pengalaman kelembagaan, dan warisan budaya terus diwariskan dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Dengan demikian, keberhasilan transformasi arsip digital tidak lagi cukup diukur melalui indikator efisiensi birokrasi atau digitalisasi layanan publik, tetapi juga melalui kemampuannya mempertahankan kontinuitas memori kolektif di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi yang berlangsung secara cepat.

Interpretasi tersebut memperluas perspektif yang selama ini berkembang dalam kajian *records management* dan *digital archives*. Literatur klasik menempatkan arsip sebagai bukti autentik atas aktivitas organisasi sekaligus instrumen akuntabilitas yang menjamin keberlanjutan administrasi (Duranti, 2010). Perspektif tersebut tetap relevan sebagai fondasi tata kelola arsip, namun perkembangan masyarakat digital memperlihatkan bahwa fungsi arsip telah melampaui dimensi administratif. Cook (2013) mengemukakan bahwa paradigma kearsipan modern telah bergeser dari orientasi penyimpanan dokumen menuju pemeliharaan memori, identitas, dan hubungan antara masyarakat dengan masa lalunya. Dalam konteks yang sama, Ketelaar (2001) menjelaskan bahwa arsip merupakan ruang tempat berbagai narasi sosial dibentuk, dinegosiasikan, dan diwariskan, sehingga nilai arsip tidak hanya terletak pada informasi yang dikandungnya, tetapi juga pada kemampuannya membangun makna kolektif. Oleh karena itu, digitalisasi tidak mengubah esensi arsip sebagai bukti autentik, melainkan memperluas kapasitasnya sebagai media yang menghubungkan memori individu, kelembagaan, dan masyarakat dalam satu ekosistem digital yang berkelanjutan.

Pemahaman tersebut memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan *memory studies*, yang memandang memori sebagai konstruksi sosial yang dipelihara melalui berbagai media dokumenter. Assmann (2011) menegaskan bahwa keberlanjutan suatu peradaban tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga oleh kapasitas untuk menjaga dan mentransmisikan memori budaya (*cultural memory*) secara berkesinambungan. Dalam konteks ini, arsip digital dapat dipahami sebagai infrastruktur yang memungkinkan memori budaya tetap hidup meskipun medium penyimpanannya mengalami transformasi. Digitalisasi memperluas akses terhadap sumber-sumber dokumenter, tetapi pada saat yang sama menuntut mekanisme tata kelola yang mampu menjamin autentisitas, integritas, dan keberlanjutan informasi. Dengan demikian, nilai strategis arsip digital tidak hanya terletak pada efisiensi pengelolaan informasi, melainkan pada kemampuannya mempertahankan kesinambungan pengetahuan sebagai bagian dari memori kolektif yang membentuk identitas sosial dan budaya.

Interpretasi ini sekaligus memperluas konsep *institutional memory* yang selama ini lebih banyak dipahami dalam konteks organisasi. Berbagai penelitian terdahulu menjelaskan bahwa memori institusional berfungsi menjaga kontinuitas pengetahuan, mendukung proses pembelajaran organisasi, dan meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketika arsip dikelola dalam ekosistem digital yang terintegrasi, fungsi tersebut berkembang melampaui kepentingan internal organisasi. Arsip digital menjadi penghubung antara memori kelembagaan dengan memori nasional melalui pelestarian warisan dokumenter yang memiliki nilai hukum, administratif, historis, ilmiah, dan budaya. Dengan kata lain, memori institusional tidak lagi berhenti pada tingkat organisasi, tetapi berkontribusi terhadap pembentukan memori kolektif masyarakat. Perspektif ini memperlihatkan bahwa tata kelola arsip digital memiliki dimensi publik yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar pengelolaan informasi organisasi, sehingga keberhasilannya perlu dipahami sebagai bagian dari pembangunan kapasitas masyarakat dalam menjaga kesinambungan pengetahuan lintas generasi.

Argumentasi tersebut juga memberikan perspektif baru terhadap diskursus *digital archival governance*. Sebagian besar penelitian kontemporer masih menempatkan transformasi arsip digital dalam kerangka interoperabilitas sistem, keamanan informasi, kecerdasan buatan, atau preservasi digital sebagai persoalan teknis. Meskipun aspek-aspek tersebut tetap menjadi prasyarat penting, penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi teknologi tidak dapat dipisahkan dari tujuan sosial yang lebih luas, yaitu menjaga keberlanjutan memori dan identitas budaya. Dengan demikian, tata kelola arsip digital perlu dipahami sebagai proses multidimensional yang mengintegrasikan aspek teknologi, kelembagaan, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial. Pendekatan ini memperluas ruang lingkup kajian kearsipan dari *technology-centred governance* menuju *memory-centred governance*, yaitu tata kelola yang menempatkan pelestarian memori sebagai orientasi utama dalam setiap proses transformasi digital. Perspektif tersebut juga sejalan dengan berkembangnya perhatian global terhadap keberlanjutan (*sustainability*) dalam pengelolaan informasi, yang menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital harus diukur berdasarkan kontribusinya terhadap keberlangsungan pengetahuan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan demikian, reinterpretasi arsip digital sebagai *civilizational memory infrastructure* memberikan landasan konseptual bagi pemahaman bahwa keberlanjutan memori tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menjaga nilai, makna, dan tanggung jawab antargenerasi. Perspektif ini menjadi penting dalam konteks masyarakat multipolar yang dihadapkan pada arus digitalisasi global, perubahan geopolitik, serta meningkatnya tantangan terhadap keberlangsungan identitas budaya. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan arsip digital tidak lagi dipahami sebagai aktivitas administratif semata, tetapi sebagai praktik *knowledge stewardship* yang menuntut adanya orientasi etis dalam menjaga hubungan antara manusia, pengetahuan, dan warisan budaya. Atas dasar inilah pembahasan selanjutnya diarahkan pada bagaimana nilai-nilai Malay-Islamic Eco-Theology menyediakan fondasi normatif bagi praktik pengelolaan pengetahuan dan memori digital yang berkelanjutan.

2. Ekoteologi Melayu-Islam sebagai Pengelolaan Pengetahuan yang Etis

Interpretasi terhadap arsip digital sebagai *civilizational memory infrastructure* membawa konsekuensi bahwa keberlanjutan memori tidak dapat dijelaskan hanya melalui kemampuan teknologi ataupun efektivitas tata kelola kelembagaan. Memori digital pada hakikatnya merupakan bentuk pengetahuan yang diwariskan lintas generasi, sehingga keberlangsungannya bergantung pada bagaimana pengetahuan tersebut dipelihara, dilindungi, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, transformasi arsip digital tidak hanya memerlukan kerangka *digital governance*, tetapi juga memerlukan kerangka etis yang mengarahkan bagaimana pengetahuan kolektif dikelola sebagai amanah publik. Perspektif ini memperluas pemahaman tentang *knowledge stewardship*, yaitu pengelolaan pengetahuan yang tidak berhenti pada aspek penciptaan, penyimpanan, dan akses informasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan nilai, makna, dan memori yang terkandung di dalamnya.

Dalam literatur *knowledge management*, konsep *knowledge stewardship* berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan yang terlalu berorientasi pada efisiensi informasi. Pengetahuan tidak dipandang sebagai aset ekonomi semata, tetapi sebagai sumber daya strategis yang memerlukan tanggung jawab sosial dan kelembagaan dalam pengelolaannya. Perspektif ini memiliki relevansi yang kuat dalam kajian kearsipan karena arsip tidak hanya menyimpan informasi, melainkan juga merepresentasikan pengalaman historis, identitas sosial, dan memori budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola arsip digital pada dasarnya merupakan praktik *stewardship*, yaitu menjaga agar pengetahuan yang diwariskan tetap autentik, dapat dipercaya, dapat diakses, dan tetap bermakna bagi generasi berikutnya. Dalam konteks tersebut, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur melalui inovasi teknologi, tetapi juga melalui kemampuan lembaga menjaga integritas pengetahuan sebagai bagian dari kepentingan publik.

Pada titik inilah hasil penelitian ini menemukan korespondensi konseptual dengan tradisi *Malay-Islamic Eco-Theology*. Penting untuk ditegaskan bahwa penelitian ini tidak berargumen bahwa regulasi kearsipan Indonesia dibangun secara langsung berdasarkan doktrin keagamaan, maupun bahwa praktik kearsipan modern harus dipahami sebagai implementasi norma-norma agama. Sebaliknya, temuan penelitian menunjukkan adanya *ethical correspondence*, yaitu kesesuaian nilai antara prinsip-prinsip tata kelola arsip digital dengan nilai-nilai etis yang berkembang dalam tradisi intelektual Melayu-Islam. Pendekatan ini memungkinkan dialog antara tata kelola

arsip modern dengan khazanah etika lokal tanpa mengaburkan karakter profesional dan sekuler dari sistem administrasi publik.

Dalam perspektif tersebut, konsep amanah dapat dipahami sebagai tanggung jawab menjaga autentisitas, integritas, dan keberlanjutan arsip sebagai bukti yang dipercaya publik. Nilai khalifah merefleksikan tanggung jawab manusia sebagai pengelola pengetahuan yang harus memastikan bahwa memori digital tetap terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Prinsip mizan menunjukkan pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi, kebutuhan akses informasi, perlindungan arsip, dan keberlanjutan lingkungan, sedangkan masalah menggarisbawahi bahwa pengelolaan arsip digital pada akhirnya diarahkan untuk menghasilkan kemanfaatan publik melalui pelestarian pengetahuan dan warisan dokumenter. Keempat nilai tersebut tidak menggantikan prinsip-prinsip profesional dalam ilmu kearsipan, tetapi memberikan dimensi etis yang memperkaya pemahaman mengenai tujuan jangka panjang tata kelola arsip digital.

Interpretasi ini juga memperluas diskursus eco-theology yang selama ini lebih banyak berkembang dalam isu lingkungan hidup dan keberlanjutan ekologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, tetapi juga mencakup pelestarian memori, pengetahuan, dan warisan dokumenter sebagai bagian dari ekologi kebudayaan (*cultural ecology*). Dalam konteks masyarakat digital, hilangnya arsip tidak hanya berarti hilangnya informasi, tetapi juga terputusnya kesinambungan memori kolektif yang menjadi dasar pembentukan identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan arsip digital dapat dipahami sebagai bagian dari praktik keberlanjutan yang menjaga keseimbangan antara manusia, teknologi, pengetahuan, dan budaya. Perspektif ini memperluas cakupan Malay-Islamic Eco-Theology dari etika lingkungan menuju etika pengelolaan memori digital yang berorientasi pada keberlanjutan peradaban.

Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa *ethical knowledge stewardship* menjadi jembatan konseptual yang menghubungkan tata kelola arsip digital dengan nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam. Hubungan tersebut bukan merupakan hubungan normatif yang bersifat doktrinal, melainkan hubungan konseptual yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai etis dapat memperkaya pemahaman mengenai pengelolaan memori digital dalam masyarakat multipolar. Landasan etis inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF), yang akan dibahas pada subbagian berikutnya sebagai kontribusi konseptual utama penelitian ini.

3. EDARF sebagai Kontribusi Konseptual terhadap Tata Kelola Arsip Digital

Pembahasan pada dua subbagian sebelumnya menunjukkan bahwa transformasi arsip digital perlu dipahami melalui perspektif yang lebih luas dibandingkan paradigma pengelolaan arsip elektronik yang selama ini mendominasi literatur. Dalam konteks ini, EDARF tidak diposisikan sebagai model operasional yang menggantikan standar atau regulasi kearsipan yang telah ada, melainkan sebagai kerangka konseptual yang membantu menjelaskan hubungan antara tata kelola arsip digital, pengelolaan pengetahuan, keberlanjutan, dan ketahanan budaya dalam satu konstruksi teoritis yang terpadu.

Kontribusi utama EDARF terletak pada upayanya menghubungkan beberapa bidang kajian yang selama ini berkembang secara relatif terpisah. Literatur mengenai *digital archival governance* umumnya berfokus pada autentisitas arsip, interoperabilitas sistem, keamanan informasi, preservasi digital, dan kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, kajian *memory studies* lebih banyak menyoroti hubungan antara arsip, memori kolektif, identitas, dan pembentukan narasi sejarah, sedangkan penelitian mengenai keberlanjutan umumnya menempatkan arsip digital dalam konteks efisiensi sumber daya atau *green information management*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga perspektif tersebut sesungguhnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan ketika arsip digital dipahami sebagai media yang menjaga keberlanjutan pengetahuan dan identitas budaya. EDARF mengintegrasikan ketiga ranah tersebut melalui suatu kerangka yang menempatkan dimensi etis sebagai penghubung antara tata kelola digital dan keberlanjutan memori kolektif.

Interpretasi tersebut memperluas diskursus mengenai tata kelola arsip digital yang selama ini cenderung berorientasi pada aspek teknologi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada kualitas infrastruktur, standar metadata, keamanan siber, dan kemampuan preservasi jangka panjang. Namun demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan arsip digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan institusi membangun budaya pengelolaan pengetahuan yang bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, *knowledge stewardship* menjadi konsep penghubung yang mempertemukan dimensi administratif, sosial, dan budaya dalam tata kelola arsip digital. Dengan demikian, EDARF memperluas pemahaman bahwa keberhasilan *digital archival governance* tidak hanya diukur dari efisiensi sistem, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kesinambungan memori yang memiliki nilai publik dan lintas generasi.

Kontribusi konseptual lainnya terletak pada integrasi Malay-Islamic Eco-Theology sebagai perspektif etis yang memperkaya diskursus tata kelola arsip digital tanpa menggeser prinsip-prinsip profesional kearsipan. Dalam penelitian ini, nilai-nilai seperti *amanah*, *khalifah*, *mizan*, dan *masalah* tidak diposisikan sebagai sumber normatif bagi regulasi kearsipan, melainkan sebagai kerangka interpretatif yang menunjukkan adanya korespondensi konseptual antara etika pengelolaan pengetahuan dengan tujuan pelestarian memori digital.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai lokal dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori yang bersifat universal melalui dialog dengan konsep-konsep kontemporer seperti *knowledge stewardship*, *cultural resilience*, dan *digital sustainability*. Dengan demikian, EDARF tidak hanya memperluas ruang lingkup kajian arsip digital, tetapi juga menunjukkan bahwa tradisi intelektual lokal memiliki relevansi dalam menjawab tantangan tata kelola pengetahuan pada era digital.

Dalam konteks kontribusi EDARF menjadi semakin penting karena memperlihatkan bagaimana Malay-Islamic Eco-Theology dapat dipahami sebagai perspektif yang mendukung penguatan *cultural resilience* melalui pengelolaan memori digital yang berkelanjutan. Ketahanan budaya dalam masyarakat multipolar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan artefak budaya atau praktik tradisional, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kesinambungan memori yang mendasari identitas kolektif suatu masyarakat. Arsip digital menyediakan ruang bagi proses tersebut, sedangkan perspektif ekoteologi memberikan orientasi etis agar pengelolaan memori digital tidak semata-mata diarahkan pada efisiensi teknologi, tetapi juga pada tanggung jawab antargenerasi, kebermanfaatan publik, dan keseimbangan antara inovasi digital dengan pelestarian nilai budaya. Dengan demikian, EDARF menawarkan suatu perspektif konseptual yang menghubungkan transformasi digital dengan keberlanjutan budaya melalui pendekatan yang relevan dengan konteks masyarakat kontemporer.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya memperluas paradigma *digital archival governance* dari pendekatan yang berpusat pada teknologi (*technology-centred governance*) menuju pendekatan yang menempatkan memori, etika, dan keberlanjutan sebagai satu kesatuan (*memory-centred and ethics-informed governance*). Pergeseran perspektif tersebut tidak mengurangi pentingnya inovasi teknologi, tetapi justru mempertegas bahwa teknologi memperoleh maknanya ketika digunakan untuk menjaga kontinuitas pengetahuan, memperkuat identitas budaya, dan mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Atas dasar itu, EDARF dapat dipahami sebagai hasil sintesis konseptual yang memperkaya dialog antara ilmu kearsipan, *memory studies*, kajian keberlanjutan, dan ekoteologi Melayu-Islam. Pembahasan ini selanjutnya mengantarkan pada implikasi yang lebih luas mengenai peran arsip digital dalam memperkuat **cultural resilience** di tengah dinamika masyarakat multipolar.

4. Ketahanan Budaya di Era Multipolar: Implikasi EDARF

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa keberlanjutan memori digital tidak dapat dipisahkan dari tata kelola pengetahuan yang berlandaskan tanggung jawab etis. Dalam perspektif tersebut, EDARF tidak hanya menawarkan sintesis konseptual bagi pengembangan tata kelola arsip digital, tetapi juga memberikan cara pandang baru mengenai bagaimana arsip digital berkontribusi terhadap penguatan ketahanan budaya (*cultural resilience*) di tengah dinamika masyarakat multipolar. Pergeseran ini penting karena tantangan utama era digital tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan teknologi, melainkan dengan kemampuan masyarakat mempertahankan kesinambungan identitas, memori kolektif, dan nilai-nilai budaya di tengah meningkatnya arus informasi global. Oleh karena itu, ketahanan budaya perlu dipahami sebagai kapasitas suatu masyarakat untuk menjaga keberlangsungan memori dan pengetahuan tanpa kehilangan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Dalam literatur internasional, *cultural resilience* umumnya dijelaskan sebagai kemampuan komunitas mempertahankan identitas dan nilai-nilai budayanya ketika menghadapi berbagai bentuk perubahan, baik yang bersumber dari globalisasi, perkembangan teknologi, maupun dinamika politik dan lingkungan. Namun, pembahasan mengenai ketahanan budaya masih relatif jarang dikaitkan secara eksplisit dengan tata kelola arsip digital. Penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan tersebut justru sangat mendasar. Memori kolektif yang menjadi fondasi identitas budaya tidak dapat dipertahankan tanpa keberadaan arsip yang autentik, dapat dipercaya, dan berkelanjutan. Dengan demikian, arsip digital bukan hanya berfungsi sebagai media penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai infrastruktur yang memungkinkan suatu masyarakat mempertahankan kontinuitas sejarah dan identitasnya dalam ruang digital.

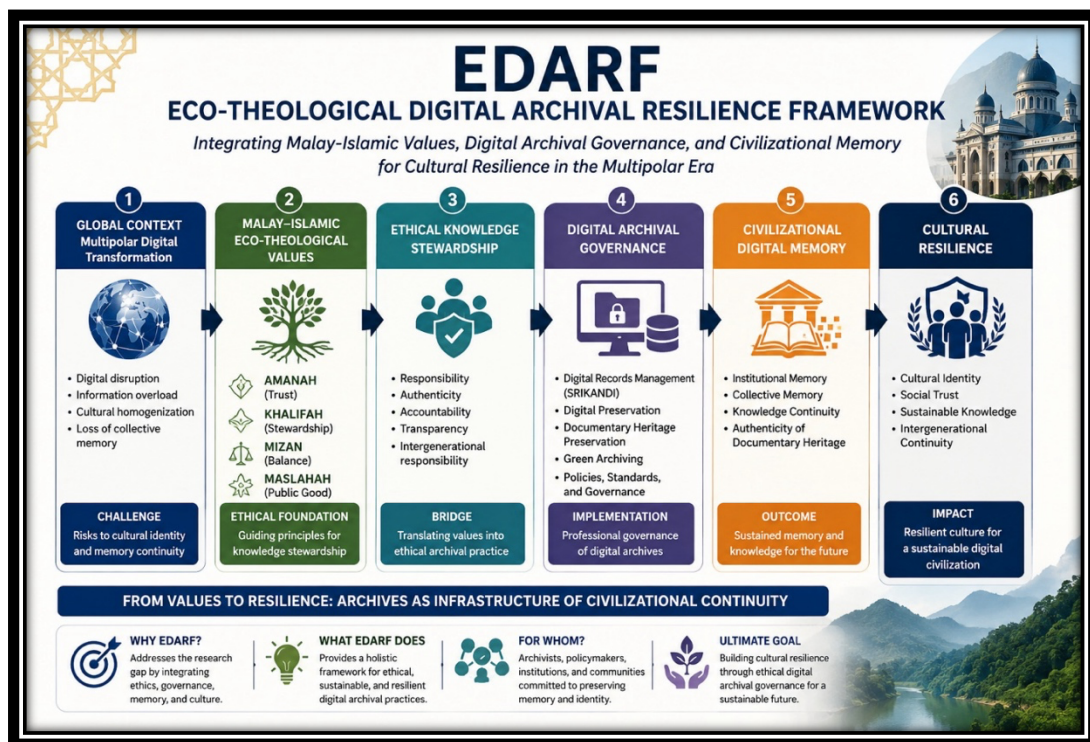
Implikasi tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat multipolar yang ditandai oleh meningkatnya interaksi lintas negara, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, serta hadirnya beragam narasi global dalam ruang informasi yang sama. Kondisi ini membuka peluang yang besar bagi pertukaran pengetahuan dan kolaborasi internasional, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan risiko terpinggirkannya memori lokal, berkurangnya keberagaman narasi sejarah, serta melemahnya kesinambungan identitas budaya apabila warisan dokumenter tidak dikelola secara berkelanjutan. Dalam situasi demikian, tata kelola arsip digital memperoleh makna strategis sebagai mekanisme yang menjaga agar transformasi digital tidak berujung pada hilangnya memori kolektif, tetapi justru memperkuat kapasitas masyarakat dalam mendokumentasikan, melestarikan, dan mentransmisikan pengetahuan lintas generasi.

Dari perspektif tersebut, *Malay-Islamic Eco-Theology* memberikan dimensi etis yang memperkaya pemahaman mengenai ketahanan budaya. Penelitian ini tidak memosisikan nilai-nilai Melayu-Islam sebagai alternatif terhadap prinsip-prinsip profesional kearsipan, melainkan sebagai lensa konseptual yang menegaskan pentingnya tanggung jawab (*amanah*), pengelolaan yang bertanggung jawab (*khalifah*), keseimbangan (*mizan*), dan kemaslahatan publik (*maslahah*) dalam menjaga keberlanjutan memori digital. Nilai-nilai tersebut

memberikan orientasi bahwa pelestarian arsip digital bukan semata-mata aktivitas teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab antargenerasi untuk memastikan bahwa pengetahuan dan identitas budaya tetap dapat diwariskan secara autentik kepada masyarakat masa depan. Dalam kerangka ini, ketahanan budaya tidak hanya dipahami sebagai kemampuan bertahan terhadap perubahan, tetapi juga sebagai kemampuan mempertahankan kesinambungan nilai melalui pengelolaan memori yang bertanggung jawab.

Implikasi konseptual EDARF juga memperluas cakupan diskursus mengenai *digital sustainability*. Selama ini, keberlanjutan dalam transformasi digital sering dikaitkan dengan efisiensi sumber daya, pengurangan penggunaan kertas, atau pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu keberlanjutan memori, pengetahuan, dan identitas budaya. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menghasilkan efisiensi administratif, tetapi juga menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat mempertahankan kesinambungan sejarahnya melalui pelestarian warisan dokumenter. Perspektif ini menempatkan arsip digital sebagai bagian dari ekosistem keberlanjutan yang menghubungkan dimensi teknologi, budaya, sosial, dan etika dalam satu kerangka yang terpadu.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa kontribusi utama EDARF tidak hanya terletak pada pengembangan kerangka konseptual bagi tata kelola arsip digital, tetapi juga pada kemampuannya menjelaskan hubungan antara memori digital, keberlanjutan, dan ketahanan budaya dalam masyarakat multipolar. Dengan mengintegrasikan perspektif *digital archival governance*, *memory studies*, dan Malay-Islamic Eco-Theology, EDARF menawarkan pemahaman bahwa penguatan ketahanan budaya memerlukan lebih dari sekadar inovasi teknologi. Ia memerlukan tata kelola pengetahuan yang menjaga autentisitas memori, memperkuat tanggung jawab antargenerasi, serta memastikan bahwa transformasi digital tetap berorientasi pada keberlanjutan peradaban. Implikasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa arsip digital dapat dipahami bukan hanya sebagai hasil modernisasi administrasi, tetapi sebagai fondasi strategis bagi keberlanjutan budaya dalam masyarakat global yang semakin saling terhubung.



Gambar 1 ini menggambarkan Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF) sebagai sintesis konseptual yang dikembangkan berdasarkan keseluruhan temuan penelitian. Kerangka ini dibangun atas asumsi bahwa transformasi arsip digital pada era multipolar tidak dapat dipahami hanya sebagai proses digitalisasi administrasi atau penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip. Sebaliknya, transformasi tersebut merupakan proses yang melibatkan hubungan erat antara tata kelola pengetahuan, nilai-nilai etis, pelestarian memori kolektif, dan keberlanjutan budaya. Oleh karena itu, EDARF memosisikan arsip digital sebagai bagian dari infrastruktur memori peradaban (*civilizational memory infrastructure*) yang keberlangsungannya bergantung pada integrasi antara dimensi teknologi, kelembagaan, sosial, dan etika.

Kerangka ini diawali dengan konteks transformasi digital global pada era multipolar, yaitu suatu kondisi ketika perkembangan teknologi informasi, arus data lintas negara, kecerdasan artifisial, dan konektivitas digital

telah mengubah cara masyarakat memproduksi, mengelola, dan memanfaatkan informasi. Di sisi lain, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya fragmentasi memori, homogenisasi budaya, ketergantungan terhadap platform digital, serta risiko hilangnya warisan dokumenter akibat perubahan teknologi yang sangat cepat. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam tata kelola arsip digital bukan lagi sekadar bagaimana menyimpan informasi secara elektronik, melainkan bagaimana menjaga agar memori kolektif tetap autentik, berkelanjutan, dan bermakna bagi generasi mendatang.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, EDARF menempatkan nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam sebagai fondasi etik yang memberikan orientasi terhadap pengelolaan pengetahuan dalam lingkungan digital. Nilai amanah merepresentasikan tanggung jawab menjaga autentisitas dan integritas arsip sebagai bukti yang dapat dipercaya. Nilai khalifah menegaskan peran manusia sebagai pengelola pengetahuan yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan memori lintas generasi. Sementara itu, mizan menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan arsip, akses informasi, dan keberlanjutan lingkungan, sedangkan masalah mengarahkan seluruh proses pengelolaan arsip agar menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Dalam penelitian ini, nilai-nilai tersebut tidak diposisikan sebagai dasar normatif bagi regulasi kearsipan nasional, melainkan sebagai kerangka etik yang memiliki korespondensi konseptual dengan tujuan utama tata kelola arsip digital, yaitu menjaga keberlanjutan pengetahuan dan memori kolektif.

Landasan etik tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam praktik *ethical knowledge stewardship*, yaitu pengelolaan pengetahuan yang menempatkan tanggung jawab, autentisitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan pengelolaan arsip digital. Pada titik inilah nilai-nilai ekoteologi tidak berhenti sebagai konsep filosofis, tetapi menjadi orientasi yang memperkuat tata kelola arsip digital. Dengan demikian, *knowledge stewardship* berfungsi sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan dimensi etis dengan praktik profesional dalam pengelolaan arsip, sehingga transformasi digital tidak hanya menghasilkan efisiensi administratif, tetapi juga menjamin keberlangsungan pengetahuan yang memiliki nilai sosial dan budaya.

Tahapan berikutnya dalam EDARF adalah digital archival governance, yaitu implementasi tata kelola arsip digital melalui pengelolaan arsip elektronik, preservasi digital, pelestarian warisan dokumenter, pengembangan sistem informasi kearsipan, serta penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan arsip. Dalam konteks Indonesia, berbagai kebijakan dan regulasi kearsipan, termasuk pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), menunjukkan bahwa transformasi digital telah bergerak menuju tata kelola yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada pelestarian informasi jangka panjang. Namun demikian, penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan tata kelola tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh adanya orientasi etik yang menjaga kesinambungan hubungan antara arsip, pengetahuan, dan kepentingan publik.

Melalui proses tersebut, tata kelola arsip digital menghasilkan *civilizational digital memory*, yaitu memori digital yang tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga mempertahankan kontinuitas pengetahuan, identitas kolektif, dan warisan dokumenter suatu bangsa. Dalam perspektif ini, arsip digital dipahami sebagai media yang menghubungkan pengalaman masa lalu dengan kebutuhan masa kini dan masa depan, sehingga keberadaannya menjadi fondasi bagi pembentukan memori sosial yang autentik dan berkelanjutan. Dengan demikian, memori digital tidak lagi dipahami sebagai hasil sampingan dari transformasi teknologi, melainkan sebagai tujuan utama yang harus dipelihara melalui tata kelola yang bertanggung jawab.

Seluruh rangkaian proses tersebut bermuara pada terbentuknya *cultural resilience*, yaitu kemampuan masyarakat mempertahankan identitas, nilai-nilai budaya, dan kesinambungan pengetahuan di tengah dinamika masyarakat multipolar. Ketahanan budaya dalam kerangka EDARF tidak dipahami sebagai upaya mempertahankan tradisi secara statis, tetapi sebagai kemampuan untuk mengelola perubahan melalui pelestarian memori yang autentik, adaptif, dan dapat diwariskan lintas generasi. Oleh karena itu, keberlanjutan budaya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengembangkan teknologi digital, tetapi juga oleh kemampuan mengelola memori kolektif secara etis sehingga tetap memberikan makna bagi masyarakat di masa depan.

Secara keseluruhan, EDARF menawarkan perspektif konseptual yang memperluas paradigma tata kelola arsip digital dari pendekatan yang berpusat pada teknologi (*technology-centred governance*) menuju pendekatan yang berpusat pada memori, etika, dan keberlanjutan (*memory-centred and ethics-informed governance*). Kerangka ini menunjukkan bahwa penguatan ketahanan budaya pada era multipolar memerlukan integrasi antara nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam, *knowledge stewardship*, tata kelola arsip digital, dan pelestarian memori peradaban. Dengan demikian, EDARF tidak hanya menjadi sintesis konseptual dari temuan penelitian ini, tetapi juga menawarkan perspektif teoretis baru yang menghubungkan ilmu kearsipan, *memory studies*, keberlanjutan, dan ekoteologi dalam satu kerangka yang koheren. Perspektif tersebut sekaligus menegaskan kontribusi utama penelitian ini terhadap tema ICON IMAD XV, yaitu bahwa ketahanan budaya pada era digital tidak cukup dibangun melalui inovasi teknologi semata, melainkan memerlukan tata kelola memori yang berlandaskan nilai-nilai etis, keberlanjutan, dan tanggung jawab antargenerasi.

5. Refleksi Integratif: Menuju Memori Digital yang Etis demi Ketahanan Budaya

Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi arsip digital perlu dipahami sebagai

perubahan paradigma dalam pengelolaan memori masyarakat, bukan semata-mata sebagai proses digitalisasi administrasi. Di tengah percepatan transformasi digital dan meningkatnya kompleksitas hubungan antarnegara pada era multipolar, arsip digital semakin berperan sebagai ruang tempat pengetahuan, identitas kolektif, dan memori historis diproduksi, dipelihara, serta diwariskan lintas generasi. Perspektif ini memperluas cara pandang terhadap arsip digital dari sekadar *recordkeeping system* menjadi bagian dari infrastruktur sosial yang menopang keberlanjutan peradaban. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur melalui tingkat adopsi teknologi atau efisiensi birokrasi, tetapi juga melalui kemampuannya menjaga autentisitas memori, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan pengetahuan sebagai warisan bersama.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ekoteologi Melayu-Islam memberikan dimensi normatif yang memperkaya kajian tata kelola arsip digital. Nilai-nilai amanah, khalifah, mizan, dan masalah tidak diposisikan sebagai pengganti prinsip-prinsip profesional kearsipan, melainkan sebagai kerangka etik yang memperkuat orientasi pengelolaan arsip menuju tanggung jawab antargenerasi, keseimbangan antara inovasi dan pelestarian, serta kemanfaatan sosial yang berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola arsip digital memiliki dimensi moral yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi teknisnya, terutama ketika arsip dipandang sebagai memori kolektif yang membentuk identitas budaya suatu bangsa. Dengan demikian, etika tidak lagi menjadi unsur pelengkap dalam transformasi digital, melainkan fondasi yang menjaga agar perkembangan teknologi tetap berpihak pada keberlanjutan manusia dan kebudayaannya.

Selanjutnya, sintesis konseptual melalui *Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF)* memperlihatkan bahwa hubungan antara etika, *knowledge stewardship*, tata kelola arsip digital, dan ketahanan budaya bersifat saling memperkuat dalam satu sistem yang utuh. Framework ini menegaskan bahwa keberlanjutan memori digital tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kapasitas institusi dan masyarakat untuk mengelola pengetahuan secara bertanggung jawab serta menjaga kontinuitas nilai-nilai budaya di tengah perubahan global. Dalam perspektif ini, ketahanan budaya dipahami sebagai kemampuan untuk mempertahankan identitas sekaligus beradaptasi secara kreatif terhadap dinamika zaman, sehingga transformasi digital menjadi sarana memperkuat, bukan mengikis, warisan budaya dan memori peradaban.

Secara keseluruhan, penelitian ini menempatkan arsip digital sebagai titik temu antara teknologi, etika, keberlanjutan, dan budaya. Posisi tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kearsipan dengan memperluas ruang dialog antara *digital archival governance*, *memory studies*, dan ekoteologi Melayu-Islam dalam menjawab tantangan masyarakat multipolar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kerangka konseptual baru bagi pengembangan tata kelola arsip digital, tetapi juga membuka arah penelitian lanjutan mengenai bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan secara lebih luas ke dalam kebijakan, praktik preservasi digital, dan strategi penguatan ketahanan budaya pada berbagai konteks sosial. Perspektif ini menegaskan bahwa masa depan memori digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, melainkan oleh kemampuan masyarakat membangun tata kelola yang etis, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan peradaban.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi dari arsip berbasis kertas menuju memori digital merupakan perubahan paradigma yang melampaui digitalisasi proses administrasi. Arsip digital berkembang menjadi infrastruktur memori peradaban yang berperan menjaga kontinuitas pengetahuan, identitas kolektif, serta warisan dokumenter dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Dengan menggunakan pendekatan *qualitative archival research*, penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan kearsipan nasional, implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), serta praktik preservasi arsip yang dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia telah membentuk fondasi penting bagi penguatan tata kelola arsip digital yang akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelestarian memori bangsa.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan memori digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh keberadaan landasan etik yang membimbing proses penciptaan, pengelolaan, preservasi, dan pemanfaatan arsip digital. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam—amanah, khalifah, mizan, dan masalah—memberikan perspektif normatif yang memperkaya praktik *digital archival governance*. Nilai-nilai tersebut mendorong pengelolaan arsip yang tidak hanya menjamin autentisitas dan akuntabilitas informasi, tetapi juga memperkuat tanggung jawab antargenerasi, keseimbangan antara inovasi dan pelestarian, serta kemanfaatan sosial sebagai bagian dari keberlanjutan budaya.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan *Eco-Theological Digital Archival Resilience Framework (EDARF)* sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan etika ekoteologi Melayu-Islam, *knowledge stewardship*, tata kelola arsip digital, preservasi memori, keberlanjutan, dan ketahanan budaya dalam satu sistem yang koheren. Berbeda dengan pendekatan tata kelola arsip digital yang umumnya berorientasi pada aspek teknologi atau manajemen informasi, EDARF menempatkan memori digital sebagai ruang pertemuan antara dimensi teknis, etis, sosial, dan budaya. Melalui perspektif tersebut, arsip digital dipahami sebagai

infrastruktur peradaban yang menjaga kesinambungan pengetahuan dan identitas masyarakat di tengah dinamika era multipolar.

Temuan penelitian ini juga memperluas kajian kearsipan dengan membangun dialog konseptual antara ilmu kearsipan, memory studies, keberlanjutan, dan ekoteologi Melayu-Islam. Integrasi lintas disiplin tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan budaya tidak hanya memerlukan inovasi teknologi digital, tetapi juga tata kelola pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai etis dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana transformasi digital dapat diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan memori dan menjaga warisan budaya sebagai bagian dari pembangunan peradaban yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun penelitian ini disusun melalui pendekatan konseptual berbasis analisis dokumen, kerangka EDARF masih memerlukan pengujian lebih lanjut dalam berbagai konteks organisasi, budaya, dan kebijakan publik. Penelitian mendatang dapat mengembangkan studi empiris pada lembaga kearsipan, institusi pemerintah, maupun organisasi budaya di berbagai negara kawasan Melayu untuk menguji implementasi, adaptabilitas, dan dampak EDARF terhadap tata kelola arsip digital dan penguatan ketahanan budaya. Pengembangan indikator operasional dan instrumen evaluasi juga diperlukan agar framework ini dapat diterapkan secara lebih luas dalam praktik maupun penelitian lintas disiplin.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan arsip digital tidak semata ditentukan oleh kemampuan menyimpan informasi dalam format elektronik, tetapi oleh kemampuan masyarakat mengelola memori secara etis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif tersebut, memori digital bukan hanya produk teknologi, melainkan warisan peradaban yang menjaga hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh karena itu, membangun tata kelola arsip digital yang berlandaskan nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam merupakan salah satu jalan strategis untuk memperkuat ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika masyarakat global pada era multipolar,

Daftar Pustaka

- Ariawan, A., Soemartono, T., Effendy, K., & Sukmana, P. (2025). Digital Transformation In Parliamentary Institutions: A Multi-Dimensional Analysis Of Srikanth Implementation And Its Impact On Information Management Effectiveness. *Media Mahardhika*. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v24i1.1420>
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2022). *Pedoman implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2024). *Laporan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Assmann, J. (2011). *Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination*. Cambridge University Press.
- Bearman, D. (1994). *Electronic evidence: Strategies for managing records in contemporary organizations*. Archives and Museum Informatics.
- Bountouri, L. (2017). *Archives in the digital age*. Chandos Publishing.
- Cele, S., Stewart, M., & Asiedu, R. (2024). Digital Archival Preservation and Cultural Heritage. *Journal of the Digital Humanities Association of Southern Africa (DHASA)*. <https://doi.org/10.55492/dhasa.v5i1.5017>
- Cook, T. (2013). Evidence, memory, identity, and community: Four shifting archival paradigms. *Archival Science*, 13(2–3), 95–120. <https://doi.org/10.1007/s10502-012-9180-7>
- Duranti, L. (2010). Concepts and principles for the management of electronic records, or records management theory is archival diplomatics. *Records Management Journal*, 20(1), 78–95. <https://doi.org/10.1108/09565691011039852>
- Edmondson, R. (2002). *Memory of the world: General guidelines to safeguard documentary heritage*. UNESCO. (UNESCO)
- Faizah, N. A., Thohir, M., Salem, S., & M. (2025). Optimizing Digital Archive Management to Improve the Quality of Integrated Public Services. *Kharisma: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*. <https://doi.org/10.59373/kharisma.v4i1.64>
- Febrianingsih, D., Arifi, A., & Sabarudin, S. (2025). Ecotheology as a New Direction in the Politics and Policy of Islamic Religious Education in Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v17i2.7426>
- Folke, C. (2016). Resilience. *Ecology and Society*, 21(4), 44.
- Gilliland, A. J. (2014). Conceptualizing twenty-first-century archives. *Society of American Archivists*.
- Halbwachs, M. (1992). *On collective memory*. University of Chicago Press. (Original work published 1950).
- Hamdan, H. (2026). Islamic Education with an Ecological Perspective: Quranic Foundations, Environmental

- Ethics, and Pathways toward Sustainable Development. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.38073/jpi.4545>
- International Council on Archives. (2016). *Principles and functional requirements for records in electronic office environments*. International Council on Archives.
- International Organization for Standardization. (2016). *ISO 15489-1:2016 Information and documentation—Records management—Part 1: Concepts and principles*. ISO.
- Ketelaar, E. (2001). Tacit narratives: The meanings of archives. *Archival Science*, 1(2), 131–141. <https://doi.org/10.1007/BF02435644>
- Ketelaar, E. (2005). Sharing: Collected memories in communities of records. *Archives and Manuscripts*, 33(1), 44–61.
- Kurniadi, K., Ibrahim, S., & Badruzzaman, B. (2025). Evaluation of the efficiency of electronic filing systems in handling records: a case study of SRIKANDI applications in government institutions. *Cogent Education*, 12. <https://doi.org/10.1080/2331186x.2025.2562347>
- Maficasari, Y. (2026). Analysis of the Implementation of the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) Application in Local Government Agencies within South Barito Regency. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v5i8.1409>
- Melnyk, R., Volkova, G., Hvozdetka, M., Bashmanivskyi, O., & Perederii, I. (2025). Digital Transformation of Cultural Heritage: Prospects and Threats. *International Journal on Culture, History, and Religion*. <https://doi.org/10.63931/ijchr.v7isi1.381>
- Millar, L. (2017). *Archives: Principles and practices* (2nd ed.). Facet Publishing.
- Mustofa, M. L., Zenrif, M. F., & Barizi, A. (2025). Towards an Islamic Ecotheology: Indonesian Muslim Organizations in Climate Mitigation and Adaptation Efforts. *Problemy Ekorożwoju*. <https://doi.org/10.35784/preko.7089>
- N., Rahman, D. A., Mardhiah, A., Fazril, M., Bakar, M. B. A., & Fakhurrizi, F. (2025). The Effectiveness of Implementing the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) at the Ministry of Religion Office of Lhokseumawe City. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i4.18051>
- Nababan, S., Samin, R., & Okparizan, O. (2026). SRIKANDI Digital Archiving Implementation. *Golden Ratio of Social Science and Education*. <https://doi.org/10.52970/grsse.v6i1.1923>
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the order of nature*. Oxford University Press.
- Nora, P. (1989). Between memory and history: *Les lieux de mémoire*. *Representations*, 26, 7–24.
- Pearce-Moses, R. (2005). *A glossary of archival and records terminology*. Society of American Archivists.
- Priyatmo, R., & Satria, O. H. (2022). Electronic Records, Record Management System, System Usability Scale, SRIKANDI. *Jurnal Kearsipan*. <https://doi.org/10.46836/jk.v17i1.192>
- Putri, D., Subagia, R., Wulandari, S., & Nurfalah, F. (2025). Srikandi Application: Digital Innovation for Dynamic Archive Management. *Jurnal Polisci*. <https://doi.org/10.62885/polisci.v2i5.840>
- Ramudin, R. P., Ramli, A. M., & Rosmana, H. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*. <https://doi.org/10.22146/khazanah.93331>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ricoeur, P. (2004). *Memory, history, forgetting*. University of Chicago Press.
- Robertus, I., & Rasmita, R. (2025). Preserving the Cultural Heritage of Indonesian Society through Digital Preservation in Libraries. *Knowledge Garden*. <https://doi.org/10.21776/ub.knowledgegarden.2025.3.1.32>
- Said, T. S., Ramli, H., & Natasha, A. D. (2023). The Adaptation of Malay Philosophy Values through Maritime education Preservation and Conservation Wisdom. *BIO Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237906001>
- Schwartz, J. M., & Cook, T. (2002). Archives, records, and power: The making of modern memory. *Archival Science*, 2(1–2), 1–19.
- Suprayitno, S., Rahmi, R., & Sofiyani, Z. (2024). Imagining the Future of Records Management: An Analysis of the SRIKANDI in Indonesia through Documentation Studies. *Proceedings from the Document Academy*. <https://doi.org/10.35492/docam/11/2/8>
- Syahputra, W., Abdullah, D., Nurdin, N., Daud, M., & Taufiq, T. (2026). Analysis of the Efficiency and Performance Effectiveness of Srikandi Application Using the UTAUT Model and Delone & Mclean. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*. <https://doi.org/10.52088/ijesty.v6i1.1806>

- Teku, M., Gobang, J., Retu, M., & Sedu, V. (2024). Digital Transformation of Archives through the SRIKANDI Application. *IJESS International Journal of Education and Social Science*. <https://doi.org/10.56371/ijess.v5i2.334>
- UNESCO World Heritage Centre. (2023). *World Heritage and Sustainable Development*. UNESCO. <https://whc.unesco.org/en/sustainabledevelopment/>
- UNESCO. (2003). *Charter on the preservation of digital heritage*. UNESCO. (UNESCO)
- UNESCO. (2012). *The Memory of the World in the digital age: Digitization and preservation*. UNESCO. (UNESCO)
- UNESCO. (2015). *Recommendation concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital form*. UNESCO
- UNESCO. (2015). *Recommendation concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital form*. UNESCO.
- UNESCO. (2020). *Thematic indicators for culture in the 2030 Agenda (Culture|2030 Indicators)*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371562>
- UNESCO. (2024). *Memory of the World: Relevant documents*. UNESCO. (UNESCO)
- UNESCO. (2025). *Memory of the World Programme*. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/memory-world/about>
- Upward, F. (1996). Structuring the records continuum—Part one: Postcustodial principles and properties. *Archives and Manuscripts*, 24(2), 268–285.
- Yeo, G. (2007). Concepts of record (1): Evidence, information, and persistent representations. *American Archivist*, 70(2), 315–343.
- Yeo, G. (2018). *Record-making and record-keeping in early societies*. Routledge.